

Tionghoa dalam Sumpah Pemuda

Oleh: Hendra Kurniawan



namun lebih pada nasionalisme Tiongkok. Meskipun demikian, gerakan ini merupakan gerakan sosial pertama yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan utama dari gerakan Tionghoa saat itu lebih pada perjuangan hak-hak warga negara bagi orang Tionghoa di Hindia Belanda.

Dilatarbelakangi oleh aura kebangkitan gerakan pemuda, di Batavia, Bogor, Sukabumi, dan beberapa kota lainnya juga muncul gerakan pemuda Tionghoa yang disebut Jong Chinese Beweging (Pergerakan Pemuda Tionghoa). Menarik jika yang lain hanya menamakan diri sebagai Pemuda Jawa (Jong Java), Pemuda Sulawesi (Jong Celebes), Pemuda Ambon (Jong Ambon), Pemuda Batak (Jong Batak), dan sebagainya, pemuda Tionghoa berani terang-terangan menyebut perkumpulannya sebagai sebuah bentuk pergerakan.

Jong Chinese Beweging didirikan untuk memperjuangkan emansipasi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda. Mereka meminta berbagai pembatasan terhadap orang Tionghoa dihapus, meminta kesamaan hak penuh di depan hukum, dan menuntut didirikannya sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa. Gerakan ini di kemudian hari berhasil mendorong pemerintah Hindia Belanda mengadakan suatu peraturan kewarganegaraan yaitu *wet op het Nederlandsch Onderdaanschap* atau undang-undang keaulanegaraan Belanda.

Tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, melalui Sumpah Pemuda,

berbagai gerakan pemuda sepakat untuk menyatukan kebulatan tekad menuju kemerdekaan Indonesia. Dalam ikrar tersebut para pemuda menyatakan berbangsa satu yaitu Bangsa Indonesia, bertanah satu yaitu Tanah Indonesia, dan

berbahasa satu yaitu Bahasa Indonesia. Meskipun berbagai organisasi Tionghoa yang ada saat itu termasuk Jong Chinese Beweging tidak mengirimkan wakilnya, namun ada beberapa orang Tionghoa yang datang atas nama pribadi atau organisasi lain. Di antaranya adalah Ong Kay Siang, John Liauw Tjoan Hok, Tjio Djien Kwie, Kwee Thiam Hong (Daud Budiman) yang juga wakil dari Jong Sumatranen Bond, dan Muhammad Chai.

Sumpah Pemuda dianggap sebagai simbol awal kesadaran kebangsaan Indonesia. Pengaruhnya juga terasa bagi organisasi Tionghoa. Pada bulan September 1932 di Surabaya, Liem Koen Hian mendeklarasikan berdirinya Partij Tionghoa Indonesia (PTI). Dijiwai oleh semangat Sumpah Pemuda, PTI berkiblat ke Indonesia, bukan ke Tiongkok. PTI bertujuan membantu rakyat Indonesia untuk membangun ekonomi, sosial, dan politik menuju Indonesia yang berdaulat penuh dengan hak dan kewajiban yang sama bagi rakyatnya. PTI dengan tegas menyatakan ikut aktif memperjuangkan tercapainya Indonesia merdeka.

Menghadirkan kembali

Sumpah Pemuda pada zamannya telah membuktikan keberhasilannya dalam menyatukan seluruh elemen bangsa ini. Berbagai kekuatan yang ada turut ambil bagian demi meraih

kemerdekaan. Termasuk pula di kalangan Tionghoa yang seringkali dianggap tidak memiliki rasa nasionalisme ke-Indonesia-an. Fakta sejarah tidak dapat berbohong, orang-orang Tionghoa juga memiliki sumbangsih yang nyata sehingga tujuan mulia Sumpah Pemuda akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sejarah Nusantara telah menggambarkan betapa kita sejak dulu bukanlah bangsa yang gemar memelihara konflik. Sikap saling menerima dan memberi ruang atas keberadaan satu sama lain dalam masyarakat majemuk sungguh diperlukan. Berbangsa harus dapat menjadi ruang yang mampu menjembatani sekat-sekat dalam masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sejak zaman yang lampau dan kembali dihadirkan melalui Sumpah Pemuda.

Kini mengenang 87 tahun Sumpah Pemuda menjadi momentum tepat untuk menemukan sekaligus menghadirkan kembali nilai persatuan dalam hidup berbangsa. Saatnya semangat persaudaraan segenap anak bangsa diwujudkan demi masa depan. Kebangsaan Indonesia yang diawali dalam Sumpah Pemuda harus kembali ditata ulang. Masyarakat Tionghoa sebagai bagian dari bangsa ini tentu memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang.

Orang-orang Tionghoa harus memperoleh ruang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat yang dilandasi Pancasila. Tidak ada lagi diskriminasi termasuk pula eksklusivitas bagi masyarakat Tionghoa. Tidak perlu ragu dan cemas dalam menyatu di tengah-tengah masyarakat. ***

Hendra Kurniawan MPd. Dosen Pendidikan Sejarah USD Jogja.